

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Ordonansi Haji Pada Masa Kolonial Belanda Di Indonesia Tahun 1869-1932 M”. Adapun fokus penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan haji pada masa kolonial Belanda di Indonesia? (2) Bagaimana politik haji yang digunakan pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi umat Islam di Indonesia? (3) Mengapa pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan ordonansi haji?.

Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan historis dan politik dengan metode penelitian historis, yang teknik pengumpulan datanya mengacu pada sumber-sumber tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan haji pada masa kolonial Belanda, khususnya yang membahas kebijakan pemerintah Belanda terhadap haji. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori kekuasaan Robert M. Maclver, untuk menganalisis kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan kebijakannya di Indonesia, khususnya kebijakan ordonansi haji (1869-1932 M.).

Dari hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa (1) Umat Islam Indonesia yang hendak pergi ke Mekkah harus memenuhi berbagai peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Seperti, kewajiban mempunyai pas jalan haji, mempunyai uang 500 gulden, menggunakan tiket pergi-pulang, melalui embarkasi haji, melaporkan kepulangannya dan mengikuti ujian haji. (2) Politik haji terbagi menjadi dua fase. Fase pertama (1800-1889), pemerintah Belanda berusaha membatasi dan cenderung mempersulit umat Islam karena menganggap orang yang telah berhaji akan menjadi fanatik dan akan mempelopori pemberontakan. Fase kedua (1889-1932), pemerintah Belanda tidak lagi mempersulit pelaksanaan haji, ini karena pengaruh C. Snouck Hurgronje dan munculnya berbagai organisasi sosial keagamaan (3) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya kebijakan ordonansi haji, yaitu faktor ekonomi, sosial dan politik.

ABSTRACT

Thesis entitled “Policy Pilgrim Ordinance in the Dutch Colonial Period in Indonesia Year 1869-1932 M”. The focus of the research will be discussed in this paper are (1) How the pilgrimage to the Dutch colonial period in Indonesia? (2) How to use the political pilgrimage Dutch colonial government in the face of Moslems in Indonesia? (3) Why are the Dutch colonial government established pilgrim ordinance policy?.

In this paper takes a historical approach and the political methods of historical research, the data collection technique refers to written sources, such as archives and books related to the pilgrimage to the Dutch colonial period in Indonesia, especially discusses government policy Dutch against pilgrim. While the theory used is the theory of power Robert M. Maclver, to analyze the power of the Dutch colonial government in implementing its policies in Indonesia, particularly the pilgrim ordinance policy (1869-1932 M).

The result reseach to conclution (1) Indonesia Moslems who wented to go to Mecca must meet various regulations and requirements set by the Dutch government. As such, the obligation has a fitting way pilgrim, should have the money as much as 500 guilders, using a round-trip ticket, through the pilgrim embarkation, reported his return and take exams pilgrimage. (2) Pilgrim political is divided into the two phases. The first phase (1800-1889), the Dutch government sought to limit and tend to complicate the Indonesia Moslems because Dutch assumption that the person who has the pilgrimage would become fanatics and will spearhead a rebellion. The second phase (1889-1932), Dutch government no longer complicate the implementation of the pilgrim, is due to the influence of C. Snouck Hurgronje and the emergence of various social and religious organizations. (3) There are several factors that affect emerge pilgrim ordinance policy, that is ecomic, social and political.